

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan atas hak-hak individu dalam demokrasi telah dijelaskan oleh Charles Costello dalam konteks kontemporer, menurut Charles demokrasi merupakan suatu sistem sosial dan politik pemerintahan. Kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan pelindungi hak setiap warga negara. Selain itu, dalam demokrasi juga terdapat pengakuan terhadap kehendak rakyat yang dijadikan sebagai landasan dalam legitimasi serta kewenangan pemerintahan. Kehendak tersebut dituangkan dalam suatu iklim politik terbuka, yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum yang diadakan secara bebas dan berkala. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memilih pihak-pihak yang akan memerintah serta juga dapat menurunkan pemerintahan yang sedang berjalan kapanpun mereka mau.

Nilai hak-hak individu demokratis merupakan adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum.. Pemilihan Umum menjadi salah satu organ penting demokrasi dalam menjembatani setiap aspirasi masyarakat dan pemerintah. Dalam pemilihan umum partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. Dimana pengertian partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara untuk mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan

pemimpin dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dikehendaki sebagai penyambung dan fasilitator seluruh aspirasi masyarakat Baik melalui Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota ataupun lembaga Legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota).

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 yaitu “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kualitas pemilu dalam suatu pemilihan umum dapat terlihat dari jumlah partisipasi pemilih untuk memilih. Partisipasi pemilih adalah salah satu indikator penting tentang bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan negara mereka. Tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi dalam banyak kasus merupakan pertanda arah demokrasi yang lebih modern, sementara jumlah pemilih yang lebih rendah biasanya dikaitkan dengan pemilih yang apatis dan ketidakpercayaan terhadap proses politik.

Realitas partisipasi politik tersebut memberikan legitimasi politik pemenang pemilu yang begitu besar dan memberikan gambaran besar kepercayaan rakyat melalui instrumen pemilihan umum. Selaras dengan hal

tersebut, tingginya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum juga menunjukkan bahwa rakyat memahami masalah-masalah politik dan ingin terlibat dalam kegiatan politik. Partisipasi yang rendah dapat diasumsikan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan dapat juga diasumsikan rendahnya partisipasi sebagai ketidakpercayaan rakyat terhadap hasil pemilihan umum yang akan membawa perubahan.

Fenomena di atas sering disebutkan sebagai golput dalam masa pemilihan umum. Fenomena golput tersebut sering juga dianggap sebagai ancaman demokrasi, karena dinilai tidak mendukung adanya pesta demokrasi. Kata “golput” sendiri berasal dari kata “golongan putih”, karena pengunjuk rasa memberikan suara kosong dengan cara mencoblos bagian putih surat suara, bukan simbol partai atau gambar calon sehingga membuat suara tidak sah. Istilah “golput” diciptakan oleh aktivis mahasiswa pada pemilu 1971 pada masa kepresidenan Soeharto. Selama bertahun-tahun, golput telah mendapatkan popularitas di kalangan kaum muda. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah tersebut juga digunakan oleh mereka yang memilih untuk golput. Di bawah undang-undang pemilu yang diperkenalkan pada tahun 2003 mengatakan “golput,” tidak lagi merupakan pelanggaran pemilu.

Golput selalu menjadi momok menakutkan bagi pemerintah. Hal ini karena kehadirannya dianggap sebagai aib yang mencoreng tidak hanya bagi kredibilitas penyelenggaraan pemilu, tetapi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Tingginya tingkat Golput dapat dimaknai dua hal. Pertama, secara administratif adalah ketidakmampuan KPU sebagai penyelenggara dalam mengurus hal-hal

administratif seperti DPT, ketersediaan surat suara, ataupun melakukan sosialisasi. Akibatnya, banyak warga negara yang kehilangan hak suaranya sehingga tidak dapat memilih. Kedua, Golput sebagai suatu perilaku politik. Hal ini artinya Golput sebagai pilihan warga negara yang secara sadar untuk tidak memilih siapapun kandidat yang ada dalam pemilu. Perilaku ini bisa merujuk kepada sikap apatisme terhadap setiap proses politik elektoral, skeptis terhadap para politisi, atau sebagai suatu bentuk protes atau perlawanan baik terhadap politisi maupun sistem yang ada. Meskipun bermacam-macam motivasi dan tujuan, penyebab Golput dalam kelompok ini secara umum adalah Ketidakpuasan.

Pada Pemilihan umum 2019 sebagian dari milenial Indonesia memilih untuk tidak memilih. Mereka merusak, menghancurkan kertas suara dan berjalan keluar dari tempat pemungutan suara. Kemunculan kelompok non pemilih di media sosial yang mengatakan dirinya sebagai gerakan “Saya Golput” ini mengatakan untuk tidak memilih karna rakyat tidak punya pilihan atas pemilihan umum di Indonesia. Berbeda dengan banyaknya cuitan golput di twitter, #sayagolput muncul sebagai gerakan yang diinisiasi oleh para aktivis Pro-Demokrasi yang pastinya paham dan mengerti perpolitikan di Indonesia dan aktif menyuarakan keadilan di Indonesia.

Gambar 1.1
Logo Saya Golput



Sumber: Medium SayaGolput

Sulit untuk mengukur berapa persen Golput disebabkan karena kesadaran masyarakat, karena belum ada hasil riset yang meneliti lebih jauh tentang itu. Tetapi, fenomena Golput menunjukkan trend peningkatan, justru ketika Pemilu diselenggarakan secara lebih terbuka (selepas di bawah Pemilu manipulatif Orde Baru). Menurut The Partnership for Governance Reform and Association for Elections and Democracy (Perludem), 48,3 juta pemilih abstain dalam pemilu 2009 dan lebih dari 58,9 juta pemilih memilih “Golput” pada pemilu 2014.

Tingkat partisipasi pemilih di Indonesia secara tradisional tinggi, secara konsisten melebihi 70 persen untuk pemilihan nasional sejak akhir rezim Soeharto. Namun, tingkat *abstain* telah menunjukkan tren yang meningkat sejak pemilihan umum 1999 (Yuniarti S, 2016:25), dan pemilih yang kecewa pada pemilu 2019 kemarin mulai menggunakan media sosial untuk menyuarakan niat mereka untuk *abstain* pada tanggal 17 April 2019 karena kekecewaan mereka

dengan kedua pasangan calon presiden tersebut, terlebih dengan sikap mereka terhadap Hak Asasi Manusia.

Sejak pemilihan umum pascareformasi tren golput terus naik. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat golput 23,30% pada Pilpres 2004, 27,45% pada 2009, dan 30,42% pada 2014 (BBC News Indonesia 2019), dari angka golput tersebut sepanjang era reformasi angka golput telah mampu mengalahkan partai pemenang pemilu (Yuniarti : 2016). Namun, berdasarkan hitung cepat LSI dengan 100% sampel, data golput pada Pilpres 2019 mencapai 19,24% (BBC News Indonesia 2019).

Dalam berbagai literatur politik disebutkan pemilu sebagai manifestasi dari demokrasi. Pada pemilu yang lebih demokratis, partisipasi pemilih seharusnya meningkat, karena rakyat lebih diberi kebebasan dalam menentukan siapa, bentuk dan rupa rezim yang akan berkuasa dalam lima tahun ke depan. Kenyataannya justru sebaliknya. Mau berdalih apapun, kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan baik dalam hal ketidakbecusan penyelenggara pemilu maupun ketidakpuasan rakyat terhadap sistem politik yang ada.

Dari penjelasan diatas, membuat peneliti berkeinginan kuat untuk membahas mengenai dinamika fenomena *abstain* (golput) dikalangan pro-demokrasi pada Pemilu 2019 di Indonesia, peneliti akan menganalisis kemunculan gerakan #SayaGolput dalam Pemilihan Umum 2019. Disamping itu juga, peneliti juga tertarik menganalisis dinamika gerakan #SayaGolput dalam mengekspresi gerakan politiknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses kemunculan gerakan #SayaGolput dalam Pemilihan Umum 2019?
2. Bagaimana dinamika gerakan #SayaGolput dalam mengekspresi gerakan politiknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis proses kemunculan gerakan #SayaGolput dalam Pemilihan Umum 2019.
2. Menganalisis dinamika gerakan #SayaGolput dalam mengekspresi gerakan politiknya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu mengenai Gerakan Sosial, Demokrasi, Pemilu dan Sosial media. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk referensi bagi yang tertarik untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya terkait dalam memahami Sosial Media dalam Demokrasi dan Politik dan memahami proses kemunculan #sayagolput di media sosial serta dampak dari adanya gerakan sosial #sayagolput ini.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintahan dalam menyikapi isu golput dan gerakan yang ada di media sosial. Serta dapat memberikan pemahaman juga terhadap pemerintah terkait dengan Faktor penyebab dan kemuculan serta dampak dari munculnya gerakan sosial #sayagolput di media sosial.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan menambah wawasan masyarakat mengenai keberadaan dan perkembangan gerakan sosial di media sosial, dan latar belakang adanya gerakan #sayagolput.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan sumber dari lapangan dan menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan pembandingan untuk menghindari duplikasi. Penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap peneliti-peneliti yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, kajian mengenai tagar SayaGolput. Penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya kajian penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

- a) Abstentions in 2014 and 2019 Indonesian elections: Case study of pro-democracy activists. Ditulis oleh M. Syaeful Anam, Gumilar Rusliwa Somantri, Universitas Indonesia (2020)

Artikel ini membahas bagaimana dinamika fenomena golput kalangan aktivis pro-demokrasi pada pemilihan umum 2014-2019 di Indonesia. Sementara para aktivis pro-demokrasi semakin memilih “perjuangan di dalam”, masih ada kelompok kritis yang memilih abstain pada 2014-2019 pemilihan Umum. Konsep tindakan kolektif dan kontroversial Charles Tilly yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti mengeksplorasi data secara mendalam wawancara sebagai data primer dan data sekunder digali melalui perpustakaan riset. Penelitian ini menunjukkan bahwa golput adalah tindakan kolektif yang kontroversial. Gerakan Golput lahir dari jaringan aktivis pro demokrasi yang telah terlibat dalam pekerjaan advokasi. Golput dilakukan sebagai protes melawan otoritas dan boikot pemilu. Pilihan boikot adalah politik yang kontroversial.

- b) Peran Masyarakat Sipil di Arena Pemilu dalam Mendorong Pilihan Politik Golongan Putih (Studi Kasus : Komunitas Virtual SayaGolput (SG) di Pemilu 2019), oleh Dwi Cahyo Sarjana thesis, Universitas Negeri Jakarta (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Komunitas Virtual SayaGolput yang hadir di arena politik pemilihan umum 2019. Sebagai wujud dari kelompok masyarakat sipil yang bersatu untuk menyuarakan kritiknya terhadap kondisi pemilihan umum 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk

menganalisis bentuk partisipasi politik lewat pilihan alternatif yaitu memilih menjadi golongan putih 2019. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa SayaGolput termasuk ke dalam komunitas virtual karena mereka terbentuk akibat penggunaan media sosial yang digunakan oleh para pendukungnya. KomunitasVirtual SayaGolput menyuarakan dan mendeklarasikan diri untuk memilih menjadi bagian dari golongan putih ideologis.

1.5.2 Kerangka Teoritis

Merupakan landasan yang digunakan peneliti untuk mengaitkan temuan dan data yang diperoleh. Teori menjadi basis awal untuk menangkap realita yang akan dikaji dalam penelitian.

1.5.2.1 Golput sebagai Gerakan Politik

Golput sebagai gerakan politik dalam iklim demokrasi adalah gerakan yang sangat diperlukan. Sistem demokrasi tidak menjamin pemerataan ekonomi dan akses keadilan bagi semua (Amenta, 2002). Golput dalam segala bentuk artikulasi juga merupakan bagian dari partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1980:6) mendefinisikan partisipasi politik sebagai “aktivitas warga negara yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.”

Berkaca dari teori Tarrow (1998), golput dapat disebut sebagai politik perlawanan. Adapun Tilly (2008), bentuk golput sebagai boikot pemilu merupakan teknik disruptif dari politik kontroversial. Oposisi politik terjadi ketika para aktivis pro-demokrasi melihat kemajuan agenda demokrasi terhambat oleh struktur dan sistem politik yang ada. Demokrasi politik dinilai semakin terbelakang, seperti

halnya demokrasi sosial dan ekonomi yang semakin tidak memberikan transformasi dalam kehidupan masyarakat. Target tuntutan ini ditujukan kepada penguasa dan elit yang diuntungkan dari iklim demokrasi saat ini.

Dasar dari gerakan golput adalah protes-kritik terhadap perilaku politik politisi yang merugikan rakyat, dan menganggap keterasingan. Kelompok kritis memainkan komponen penting dari partisipasi dalam masyarakat demokratis. Fenomena ini dikenal sebagai ‘demokrasi dari bawah’. Jalan demokrasi kontemporer adalah demokrasi elit, dengan pemilihan umum hanya sebagai mekanisme politik prosedural lima tahun untuk menjaga sirkulasi kelompok elit. Pemilu harus membuka jalan untuk perbaikan kehidupan, seperti yang dikatakan Lane (2014). Demokrasi dan kemakmuran dipandang sebagai hal yang sama, dan dalam banyak hal, bagi rakyat, keduanya harus digabungkan. Gerakan golput di Indonesia pada pemilu 2014 dan 2019 tak lepas dari para aktor demokrasi. Golput diartikan sebagai tindakan aktif dan kritis dalam menilai peristiwa sosial dan politik yang terjadi.

Ada banyak penelitian tentang *abstain*. Golput didefinisikan sebagai ekspresi politik dan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa (Obradovic-Wochnik dan Wochnik 2014; Superti 2015; Superti 2016). Protes dilakukan ketika pemerintah yang berkuasa kurang optimal dalam kinerjanya. Beberapa sarjana, seperti Fachichini dan Jaeck (2019) dan Plane dan Gershtenson (2004), lebih memfokuskan penelitian mereka pada studi perilaku pemilih dengan menjelaskan penyebab keputusan golput. Golput juga diharapkan ketika keberadaan sistem politik dan partai politik lebih banyak membawa kepentingan elit (Kang 2004;

Birch dan Dennison, 2017). Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa golput dipilih karena kenyataan semakin menjauh dari cita-cita demokrasi (Blais et al. 2019; Katz dan Levin, 2018; Powert dan Roberts, 1995). Selain itu, alasan golput juga dikaitkan dengan pendidikan politik, khususnya pengetahuan dan informasi politik (Feddenser dan Pesendorfer, 1999; Almlund, 2018)

1.5.2.2 Gerakan Politik Berbasis Digital

Media digital memiliki ruang untuk mengisi kekurangan sumber daya dan dinamika politik yang semakin terbatas untuk memobilisasi massa yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, mobilisasi dunia digital digunakan sebagai strategi gerakan sosial. Arab Spring yang melanda Tunisia, Mesir hingga Suriah, Revolusi Payung di Hongkong, hingga aksi terorisme yang dikomandani ISIS di berbagai belahan dunia adalah contohnya. Bentuk mobilisasinya pun beragam, mulai dari aksi spontan tanpa komando seperti Occupy Wall Street, jaringan transnasional terdesentralisasi seperti Women's March, hingga aksi yang dipimpin oleh aktivis dan LSM seperti Earth Hour dan seruan perubahan iklim. Media sosial juga merubah gerakan sosial. Pada Pemilu 2019, kelompok aktivis pro demokrasi gerakan Golput menggunakan media sosial sebagai alat propaganda.

Nugroho (2011) melakukan penelitian di Indonesia dengan melihat partisipasi dan tindakan masyarakat sipil, dalam melakukan aktivisme dengan menggunakan teknologi Internet. Salah satu kesimpulan dari penelitian ini yang sangat menarik adalah mengenai "*click activism*". Hal ini juga mendapat kritik apakah gerakan di media sosial adalah gerakan nyata dengan bobot yang sama dengan aktivisme gaya lama, dan bagaimana kelanjutan antara realitas maya

dengan realisasi yang nyata. Meskipun penting, gerakan di media sosial sering diartikan hanyalah gerakan yang ada di online saja, sebatas sebuah #hashtag Twitter atau Facebook, dan dianggap tidak memiliki makna seperti sebuah gerakan yang dilakukan di jalan dengan ikat kepala, ataupun ikut berteriak dalam persidangan

Namun sejumlah aktivitas media sosial terbukti mampu membangkitkan aksinya di dunia nyata. (Lim dalam Agung, 2017) menyebut fenomena ini sebagai revolusi 2.0. Keberhasilan ini tidak hanya karena pengaruh media sosial saja secara mandiri (*independence*), tetapi juga dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan dalam konteks sejarah politik suatu masyarakat. Aktivitas media sosial juga dapat dijelaskan dengan pandangan awam para actor gerakan terhadap sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Alasan penggunaan media sosial sebagai strategi gerakan #SayaGolput juga layak dibaca sebagai upaya perebutan kekuasaan yang tidak lepas dari sejarah politik di Indonesia. Alasan munculnya gerakan SayaGolput di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak 1971 dan terus dilakukan setiap adanya Pemilu, dengan adanya media sosial yang kini menjadi wadah menggali informasi dan berkomunikasi. Kini gerakan sosial telah berubah dalam menyebarkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui media sosial.

Peta gerakan masyarakat di Indonesia telah berkembang dari *virtual- best action* ke *real-best action* serta dari ruang sipil ke ruang politik (Murti, 2013). Namun, anggapan pesimis akan media sosial sebagai pendorong gerakan nyata masih tetap ada. Meikle (2002) dan Loader (2011) mempertanyakan perbandingan komitmen antara aktivis gerakan digital atau juga disebut *keyboard activism* dengan aktivis dunia nyata. Mereka menyebutkan bahwa komitmen aktivis dunia nyata

cenderung lebih tinggi sehingga memunculkan gerakan yang konsisten. Sedangkan *keyboard activism* cenderung "datang dan pergi" sehingga hanya menjadi gerakan sesaat yang kemudian hilang. Pendapat lain menegaskan bahwa Transformasi dari gerakan digital ke kegiatan nyata tidak bisa disimpulkan semata-mata pengaruh dari media sosial. *"These changes happen primarily not because the tools, but because of the people, who are the agent of the change"* (Nugroho, 2011:80). Media sosial memang penting untuk perubahan akan tetapi perubahan itu bergantung pada pilihan pemilihan penggunaan media dan ketepatan penggunaannya.

Gerakan Golput di Indonesia bukanlah gerakan digital atau *keyboard activism*. Gerakan ini sudah ada jauh dari sebelum adanya internet. Penggunaan internet dalam gerakan ini dimanfaatkan sebagai media penyalur gerakan, sebagai wadah untuk menyebarluaskan gerakan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan konsep Gerakan Politik karna dasar dari gerakan golput adalah protes kritik terhadap perilaku politik politisi yang merugikan rakyat. Dengan ini penulis menyimpulkan jika Golput juga merupakan bagian dari partisipasi politik warga negara melalui SayaGolput masyarakat menuangkan keresahan dan protes terhadap system politik Indonesia yang dianggap tidak demokratis. SayaGolput membawa berbagai isu agenda yang diharapkan dapat merubah keputusan dan kebijakan juga sistem politik di Indonesia agar lebih demokratis.

Dalam melihat fenomena ini penulis melihat bahwa SayaGolput juga merupakan gerakan politik berbasis digital karna proses terbentuknya gerakan ini merupakan peran dari media sosial yang dapat menyatukan para pengikutnya dengan melihat dari individu yang bergabung berasal dari berbagai kelompok dan mereka tergabung ke dalam sebuah gerakan digital karna adanya tujuan dan alasan yang sama dengan sebuah wadah digital yaitu media sosial.

1.7 Argumen Penelitian

Gerakan SayaGolput adalah salah satu gerakan sosial baru yang mengadopsi teknologi internet, gerakan ini menggunakan sosial media sebagai propaganda. Gerakan SayaGolput dalam Pemilihan Umum 2019 ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan apolitik dan tak paham politik, gerakan ini justru terus ada ditengah-tengah Pemilu sejak reformasi karna aktivis Pro-Demokrasi sadar akan adanya ketidakadilan di negara ini, gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sistem demokrasi perwakilan di Indonesia yang tidak adil.

Sistem Politik Indonesia yang dikuasai oleh kekuatan oligarki dan permainan media yang telah dikuasai oleh para elit, kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat, kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang tidak akan disentuh selama para pelakunya ada didalam Pemerintah Indonesia sendiri, beragam alasan yang menunjukkan adanya kesadaran politik ini menimbulkan keberanian para aktivis pro-demokrasi untuk *abstain* pada Pemilu 2019.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari problematika sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Sedangkan menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam buku Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data. Adapun ruang lingkup subjek penelitian ini adalah aktivis Pro-demokrasi. Dalam penelitian ini juga melibatkan lima masyarakat yang memilih golput dalam Pemilu 2019 namun tidak tergabung dalam gerakan #SayaGolput.

1.8.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah berupa wawancara dan teks dokumen yang berisi kata-kata informasi serta teks kata-kata tertulis dalam tweet yang menggunakan hashtag #Sayagolput. Jenis data ini berupa kualitatif dengan konsep yang digambarkan dalam kata yang digunakan untuk mengetahui opini publik yang terbentuk pada hashtag #Sayagolput.

1.8.4 Sumber Data

Data dalam sebuah penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sumber data sebagai pemenuhan kebutuhan penelitian terbagi menjadi dua (Sugiyono, 2009: 225) :

a) Sumber data primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut ;.

1. Alghiffari Aqsa (Direktur LBH Jakarta 2008-2018)
2. Bilven Sandalista (Aktivis dan Pendiri Penerbit Ultimus)
3. Asep Komarudin (Senior Forest Campaigner Greenpeace SEA)
4. Niccolo Attar (Staff Kampanye dan Jaringan YLBHI)
5. Ardhito Harinugroho (Majalah Sorage)
6. Lini Zurlia (Aktivis queer feminis Indonesia dan advokat Asean Sogic Caucus)
7. Dinda Nisa Yura (Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan)
8. Nisrina Nadhifah Rahman (Hivos SEA)
9. Ogi YLBHI

10. Cornel LBH Semarang

Dalam penelitian ini juga melibatkan lima masyarakat yang memilih golput dalam Pemilu 2019 namun tidak tergabung dalam gerakan #SayaGolput.

b) Sumber data sekunder, yaitu merupakan referensi penunjang berupa tulisan dan gambar. Data ini merupakan studi literatur tentang kajian analisis wacana kritis yang mana data diperoleh dari buku, jurnal penelitian, artikel di internet maupun media cetak yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diambil.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan analisis dan pengkajian. Pengumpulan data tersebut sudah dilakukan sejak peneliti menentukan permasalahan yang sedang dikaji, untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Menurut Esterberg, teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Ada beberapa macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur (Sugiyono, 2009). Wawancara Semiterstruktur termasuk kedalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara perlu mendengarkan secara

teliti apa topik yang dibahas. Wawancara dilakukan terhadap Aktivitis pro-demokrasi yang turut mengkampanyekan #sayagolput di twitter dan aktivitas offline.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa teks pada lini masa Twitter yang menggunakan hashtag #Sayagolput. Mengingat penelitian yang dilakukan adalah analisis terhadap teks tweet di Twitter, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling atau sampel bertujuan, kemudian dikategorikan berdasarkan konteks-konteks yang muncul selama pengamatan peneliti. Dengan demikian, teknik pengambilan sampel bertujuan ini dirasakan sangat tepat digunakan untuk penelitian analisis wacana teks yang peneliti lakukan. Penelitian pustaka (*library research*), dengan mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan, untuk mendukung analisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa digambarkan.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data berarti sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola tertentu. Data yang telah didapat dan dikumpulkan lalu diolah kemudian disusun menjadi padu. Setelah itu peneliti melakukan penyusunan dengan mengklasifikasi data. Kemudian setelah dilakukan proses pemilihan data yang penting dan tidak penting, dilakukan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. Dan langkah terakhir melakukan analisis data sesuai dengan

kontruksi pembahasan hasil penelitian nantinya. Tahap analisi data dalam penelitian kualitatif adalah (Ahmad, 2009:159) :

1. Pengumpulan data

Pada tahapan ini peneliti haruslah mengumpulkan data-data yang didapat melalui berbagai sumber, yaitu dari wawancara, obervasi, dokumen probadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya.

2. Reduksi data

Selanjutnya data tersebut direduksi dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

3. Penyajian data

Merupakan proses penyusunan sekumpulan informasi atau data dalamsatuan-satuan, yang sekaligus mmberikan kategori dengan melakukan *coding*. Sehingga data tersebut dapat terkuasai oleh peneliti.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Peneliti mencari makna dari data yang diperoleh. Dengan cara melihat pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Verifikasi data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengnmbilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat didalam penelitian ini

1.8.7 Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah paling terakhir yang dilakukan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan terus selama masih melakukan penelitian lapangan. Dimulai dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan bersifat terbuka dan longgar, namun kesimpulan tersebut harus tetap disediakan.

1.8.8 Kualitas Data (*goodnews criteria*)

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan sejumlah informasi yang diinginkan, peneliti melakukan uji coba atau memeriksa kembali apakah data-data yang diperoleh sesuai dengan sumber yang benar. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dipergunakan dengan sembarangan.